



RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019

RENCANA

KUTA MANDALIKA

FINISH

REVIEW



Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id, www.bappenda.ntbprov.go.id



[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)



[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)



[@bappenda.ntb](https://twitter.com/bappenda.ntb)



www.bappenda.ntbprov.go.id



bappenda@ntbprov.go.id

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2019 (Review)



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
JL. MAJAPAHIT 17 MATARAM (83117)

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan kurunia serta perkenan-Nya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan penyusunan revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Revisi Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

Tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dan Renstra Bappenda Tahun 2013-2018, dimana pada Renja 2019 sebelumnya masih mengacu pada nomenklatur lama, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi yang akan kita hadapi pada tahun mendatang dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Diharapkan Renja Bappenda Provinsi NTB ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian Visi NTB Gemilang dan Misi NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB yang mengusung sasaran penguatan fiskal daerah dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Demikian Renja yang kami buat, semoga bermanfaat khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan tatakelola yang baik (*good governance*).

Mataram, Oktober 2018
Kepala Bappenda Provinsi NTB



Ir. H. Iswandi, M.Si.
NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijkasanaan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	34
3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV Penutup	40
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB (revisi) Tahun 2019 memuat rancangan program dan kegiatan yang segera termuat dalam Rancangan awal Renstra 2018 – 2023 serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam Rancangan RKPD Tahun 2019, karena tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Bappenda Tahun 2013-2018. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratif dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mitra terkaitnya.

Tantangan yang dihadapi oleh Bappenda Provinsi NTB adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target-target makro pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja, penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Serta lebih mempertajam pemanfaatan teknologi informasi yang harus sejalan dengan pola layanan perbankan, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah.

Dalam kerangka percepatan kinerja, Bappenda Provinsi NTB menggagas Tiga Ikhtiar yang memuat : (1) Penguatan soliditas aparatur, (2) Penguatan akses pelayanan pendapatan yang makin mudah, nyaman & aman serta (3) Pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur. Ketiga ikhtiar Bappenda tersebut, akan terus diperkuat dengan penanaman

spirit terhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus menjadi kunci kepemimpinan bersama, yang memuat : Integritas (*Integrity*), Harmonis (*Harmonically*), Sinergis (*Sinergic*), Amanah (*Trusteeship*), serta Niat (*Aim*), yang disingkat menjadi IHSAN.

Rencana Kerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 (Review) menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara Upaya mensukseskan target target indikator pembangunan daerah yang termuat dalam (1) RPJMD Teknokratiks 2018 – 2023 dan RKPD 2019, (2) Ketersediaan potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi serta (3) Upaya pengelolaan potensi pendapatan daerah (*earning effort*), dimana ketiganya merupakan satu kesatuan manajemen pendapatan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian visi NTB Gemilang dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (revisi) Tahun 2019, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 26, Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);

17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 (Review) adalah untuk menjadi pedoman bagi Bappenda Provinsi NTB dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan tujuannya adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran pelaksanaan tugas fungsi Bappenda;
2. Merumuskan rencana program dan prioritas pelaksanaan tugas fungsi Bappenda;
3. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal;
4. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya;
6. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima; dan
7. Memantapkan kinerja organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 (Review) disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.2 Landasan Hukum

Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat serta susunan garis besar dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018)
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun-tahun sebelumnya
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan /atau realisasi APBD.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
 - Menjelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
 - Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, telaahan terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
 - Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional (Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Bappenda Provinsi NTB)
 - Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .
- 3.3. Program dan Kegiatan
 - Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : Penutup

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA PROVINSI NTB TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Provinsi NTB

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019, merupakan tahun tranasisi antara rezim pemerintahan lama dengan pemerintahan baru dan kebijakan perencanaan didasarkan padarancangan awal RPMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 (Teknokratiks), dan secara garis besar program dan kegiatan yang ada telah mencapai sasaran yang diharapkan dalam Renstra periode sebelumnya, namun ada beberapa Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi dan beberapa program dan kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai hal tersebut, sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemeritah Pusat, OPD Penghasil, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan peran Unit Pelayanan Pajak Daerah se NTB dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Adapun upaya untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi secara persuasive dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV - TAHUN 2017 (dalam jutaan)

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN (PENDAPATAN)																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (%)	100	61.379	47,33	29.052	23,62	14.498	2,70	1.659	4,70	2.882	4,60	2.823	9,98	6.127	5,19	13.491	21,98	93,06	52,52	42.544	52,52	69,31		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terfasilitasinya kebutuhan jasa Surat Menyurat	60	452,2	30,28	228	12,97	98	1,69	13	2,05	15	2,88	22	4,82	36	11,44	86	88,22	88,22	41,72	314	69,54	69,54	Bappenda	
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	11.426,7	25,60	4.875	13,80	2.629	2,45	466	2,35	448	2,59	494	4,67	889	12,06	2.296	87,34	87,34	37,66	7.171	62,76	62,76	Bappenda	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terfasilitasinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	100	2.868,6	55,87	1.603	19,47	559	4,31	124	4,98	143	4,48	129	5,19	149	18,96	544	97,34	97,34	74,82	2.146	74,82	74,82	Bappenda	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terfasilitasinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	100	9.300,9	52,25	4.860	23,11	2.150	3,86	359	5,47	509	5,63	524	7,74	720	22,70	2.112	98,23	98,23	74,96	6.972	74,96	74,96	Bappenda	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terfasilitasinya kebutuhan alat tulis kantor	100	3.281,6	48,91	1.605	25,89	850	3,55	117	5,61	184	8,26	271	8,38	275	25,81	847	99,66	99,66	74,72	2.452	74,72	74,72	Bappenda	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terfasilitasinya kebutuhan penyediaan barang cetakan	100	6.929,9	43,66	3.025	20,76	1.438	0,89	62	4,42	306	0,68	47	11,14	772	17,13	1.187	82,52	82,52	60,78	4.212	0,78	60,78	Bappenda	

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV										
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terfasilitasinya kebutuhan jasa pelayanan penerangan kantor	60	419,0	33,59	235	11,25	79	1,79	12	2,78	19	3,01	21	3,55	25	11,13	78	98,96	98,96	44,71	312	74,52	74,52	Bappenda
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	15.840,5	45,69	7.238	26,16	4.144	0,95	151	4,45	706	4,39	695	14,74	2.335	24,54	3.887	93,79	93,79	70,23	11.125	70,23	70,23	Bappenda
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya kebutuhan bahan bacaan media masa	100	324,2	43,96	143	25,26	82	3,75	12	4,16	13	4,49	15	10,71	35	23,11	75	91,48	91,48	67,07	217	67,07	67,07	Bappenda
	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum rapat	60	.600,3	23,31	622	14,93	398	1,94	52	2,32	62	2,71	72	6,90	184	13,86	370	92,85	92,85	37,17	991	61,95	61,95	Bappenda
	Penyelarasan program Pemerintah Pusat Daerah	Terfasilitasinya koordinasi penyelarasan antara Pemda, Pemerintah Pusat dan Provinsi Lainnya	60	2.213,1	33,51	1.236	13,14	485	0,69	25	2,89	106	3,73	137	5,67	209	12,97	478	98,71	98,71	46,48	1.714	77,47	77,47	Bappenda
	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Terfasilitasinya kebutuhan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	60	1.826,0	30,15	918	13,82	421	1,70	52	3,79	115	3,39	103	3,39	103	12,27	373	88,73	88,73	42,42	1.291	70,70	70,70	Bappenda
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terfasilitasinya kebutuhan keamanan kantor	100	4.896,2	50,35	2.465	23,83	1.167	4,40	216	5,20	255	6,00	294	8,07	395	23,67	1.159	99,30	99,30	74,02	3.624	74,02	74,02	Bappenda
									2,46		3,88		4,02		7,31	Rata-rata capaian kinerja		93,63	93,63			70,27	70,27		
																	Predikat kinerja		ST	ST					

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017	Unit SKPD Penanggung Jawab							
						I		II		III		IV													
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	100	48.278	30,31	14.631	32,71	15.792	2,24	354	16,27	2.569	14,77	2.333	62,50	9.870	31,33	15.126	95,78	95,78	61,64	29.757	61,64	61,64	
	Pembangunan gedung kantor	Terfasilitasinya pembangunan gedung kantor	100	22.003	27,55	6.062	32,55	7.161	0,30	22	19,75	1.415	8,37	600	68,32	4.893	31,49	6.929	9675	96,75	59,04	12.990	59,04	59,04	Bappenda
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	100	7.635	25,24	1.927	39,42	3.010	-	-	7,87	237	28,07	845	62,69	1.887	38,88	2.968	98,63	98,63	64,11	4.895	64,11	64,11	Bappenda
	Pengadaan meubelair	Terfasilitasinya kebutuhan meubelair	100	3.773	43,04	1.624	35,45	1.337	3,76	50	12,96	173	9,55	128	65,10	871	32,39	1.222	91,38	91,38	75,43	2.846	75,43	75,43	Bappenda
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor	60	3.281	57,52	1.888	16,43	539	6,48	35	20,86	112	20,92	113	49,22	265	16,02	526	97,49	97,49	73,54	2.413	22,57	73,54	Bappenda
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan operasional	100	6.198	34,67	2.149	22,71	1.408	13,57	191	15,01	211	16,21	228	41,91	590	19,69	1.220	86,70	86,70	54,36	3.369	54,36	54,36	Bappenda
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terfasilitasinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	60	1.043	38,41	401	22,77	237	11,46	27	19,49	46	18,37	44	35,44	84	19,30	201	84,76	84,76	57,71	602	96,18	57,71	Bappenda
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terfasilitasinya pemeliharaan peralatan kantor	60	1.349	43,16	582	18,91	255	11,17	28	21,02	54	21,05	54	45,06	115	18,59	251	98,29	98,29	61,75	833	102,92	61,75	Bappenda
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terfasilitasinya rehabilitasi bangunan gedung kantor	60	2.996	-	-	61,55	1.844	-	-	17,40	321	17,49	323	63,19	1.165	60,38	1.809	98,09	98,09	60,38	1.809	100,63	60,38	Bappenda
									5,84		16,79		17,50		53,87	Rata-rata capaian kinerja	94,01	94,01					84,40	63,29	
																Predikat kinerja	ST	ST							

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV										
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mendukung peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	1.429	32,07	458	30,19	432	2,14	31	2,47	35	5,02	72	11,37	163	6,34	300	21,01	69,59	38,41	759	38,41	53,08	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terfasilitasinya Aparatur peserta pendidikan formal, diklat teknis substantive, diklat teknis struktural dan fungsional, serta peserta kursus, seminar, dan lokakarya;	100	764	32,56	249	25,93	198	1,15	9	0,62	5	6,34	48	10,77	82	18,88	144	72,83	72,83	51,44	393	51,44	51,44	Bappenda
	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terfasilitasinya pembinaan mental, fisik & disiplin aparatur	60	666	31,51	210	35,08	234	3,28	22	4,59	31	3,51	23	12,06	80	23,45	156	66,85	66,85	54,96	366	91,61	54,96	Bappenda
									2,22		2,61		4,93		11,42	Rata-rata capaian kinerja		69,84	69,84			71,52	53,20		
									Predikat kinerja								S	S			80,77	51,04			
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	20	2.407	16	482	4	780	0,48	94	0,73	142	0,62	122	1,99	388	0,15	746	3,83	95,73	16,15	1.228			
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terfasilitasinya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pem. (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT & PK) yang disusun	5	703	4	158	1	227	0,11	26	0,17	38	0,07	16	0,61	139	0,97	219	96,67	96,67	4,97	377	99,33	53,57	Bappenda
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun	5	543	4	138	1	180	0,36	65	0,20	36	0,00	0,19	0,40	72	0,97	174	96,82	96,82	4,97	312	99,36	57,50	Bappenda

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Perencanaan yang disusun (Rencana Kerja/ RKA/ DPA TA 2018 dan 2019)	10	1.161	8	186	2	373	0,02	3	0,36	67	0,56	105	0,95	177	1,89	353	94,65	94,65	9,89	540	98,93	46,48	Bappenda
									0,17		24		0,21		0,65	Rata-rata capaian kinerja		96,04	96,04			99,21	52,52		
									Predikat kinerja								ST	ST							
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Tertib pengelolaan aset BMN/BMD	100	1.220	43,30	528	21,68	264	2,94	36	6,39	78	5,47	67	6,26	76	4,57	257	21,06	97,15	47,87	785	47,87	64,37	
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyusunan Laporan pengelolaan asset/ barang milik daerah	100	1.220	43,30	528	1,68	264	2,94	36	6,39	78	5,47	67	6,26	76	21,06	257	97,15	97,15	64,37	785	64,37	64,37	Bappenda
									2,94		6,39		5,47		6,26	Rata-rata capaian kinerja		97,15	97,15			64,37	64,37		
									Predikat kinerja								ST	ST							
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Mendukung terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	7,64	54.484	2,09	15.494	5,19	4.803	79,04	1.170	(54,64)	2.814	(18,77)	2.666	23,78	6.585	23,78	13.234	458,19	89,40	23,78	28.620	23,78	52,53	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerahdan retribusi	Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah	100	1.801	23,49	423	37,82	681	1,65	30	8,44	152	3,88	70	18,81	339	32,77	590	86,66	86,66	56,25	1.013	56,25	56,25	Bappenda
	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya reali- sasi penerimaan pajak daerah	100	21.500	37,59	8.083	23,20	4.988	2,16	464	5,03	1.082	5,37	1.155	8,68	1.866	21,25	4.568	91,58	91,58	58,84	12.651	58,84	58,84	Bappenda

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I				II												
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	Terfasilitasinya peningkatan keterampilan teknis ke Samsatan	100	4.357	36,79	1.603	25,36	1.105	1,03	45	4,55	198	8,16	356	9,86	430	23,59	1.028	93,01	3,01	60,39	2.631	60,39	60,39	Bappenda
	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	100	9.186	33,12	3.042	25,77	2.367	5,37	493	6,33	581	5,50	505	7,42	682	24,61	2.261	95,53	95,53	57,73	5.303	57,73	57,73	Bappenda
	Peningkatan kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya peningkatan sadar pajak dan retibusi daerah	100	3.210	-	-	40,76	1.308	0,33	11	4,45	143	2,57	83	30,50	979	37,85	1.215	92,86	92,86	37,85	1.215	37,85	37,85	Bappenda
	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa Pajak Daerah dan Retribusi daerah	100	542	-	-	38,71	210	3,38	18	1,21	7	-	-	28,50	154	33,09	179	85,48	85,48	33,09	179	33,09	33,09	Bappenda
	Pengembangan sistem informasi Managemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terfasilitasinya penyediaan informasi pengelolaan pendapatan daerah	100	1.077	-	-	51,97	560	-	-	13,86	149	-	30	27,77	299	41,63	478	80,11	85,40	41,63	478	41,63	44,38	Bappenda
	Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi NTB	Terfasilitasinya kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	100	1.766	-	-	62,18	1.098	0,28	5	14,20	251	3,40	60	38,51	680	56,39	996	90,69	90,69	56,39	996	56,39	56,39	Bappenda
	Pendataan, penyampaian Surat	Terfasilitasinya update data wajib	100	2.461	-	-	29,78	733	1,32	32	2,97	73	3,06	75	13,03	321	20,38	501	68,43	68,43	20,38	501	20,38	20,38	Bappenda

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab	
									I				II												III
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Teguran dan Penagihan Pajak	pajak terlaksana-nya penyampaian surat teguran dan penangihan tunggakan kepada wajib pajak																							
	Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Terfasilitasinya kebutuhan konsultasi koordinasi dan monitoring dana perimbangan	60	2.165	18,16	655	13,13	474	1,15	41	1,82	66	0,54	19	7,68	277	11,18	403	85,16	85,16	29,34	1.059	48,90	48,90	Bappenda
	Akurasi dan sinkronisasi data pendapatan daerah terkait	Terfasilitasinya penyusunan bahan laporan rapat koordinasi dipenda NTB dengan dinas instansi terkait	100	1.187	41,01	487	23,74	282	-	-	4,15	49	-	86	10,98	130	15,14	265	63,76	94,10	56,15	752	56,15	63,35	Bappenda
	Koordinasai dan Sinkrinisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Terfasilitasinya penyusunan data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan PLL	100	567	18,45	105	41,20	233	-	-	0,51	3	-	18	12,94	73	13,45	94	32,65	40,22	31,90	198	31,90	35,02	Bappenda
	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Terfasilitasinya penyusunan data hasil verivikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL	100	546	23,83	130	13,90	76	-	-	3,64	20	-	16	2,02	11	5,65	47	40,69	61,43	29,49	177	29,49	32,37	Bappenda
	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Terfasilitasinya penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan bimtek	100	2.497	16,30	407	25,16	628	0,44	11	1,58	40	7,03	175	12,98	324	22,03	550	87,53	87,53	38,32	957	38,32	38,32	Bappenda

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL	100	322	24,89	80	18,68	60	6,04	19	-	-	5,85	19	-	20	11,89	58	63,68	97,04	36,79	138	36,79	43,02	Bappenda
	Sosialisasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah	100	615	60,33	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,33	371	60,33	60,33	Bappenda
	Aplikasi Retribusi dan PPL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Aplikasi Retribusi dan PPL	100	402	26,89	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya penyusunan data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Terfasilitasinya upaya peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan	60	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappenda
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	100	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-									-	1,54		4,85		3,02		15,31	Rata-rata capaian kinerja		57,89	62,76			36,22	37,33	
																			R	R					
7	Program Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100	1.276	35,88	458	28,24	360	4,21	54	5,21	67	5,85	75	12,97	165	7,97	360	28,24	100,00	43,86	818	43,86	64,12	
	Pembinaan, Pengendalian dan	Terfasilitasinya kebutuhan	60	1.276	21,53	458	16,94	360	2,52	54	3,13	67	3,51	75	7,78	165	16,94	360	100,00	100,00	38,47	818	64,12	64,12	Bappenda

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn berjalan yg di Evaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Kepegawaian	pembinaan , pengendalian dan pengawasan kepegawaian																							
									2,52		3,13		3,51		7,78	Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja		100,00	100,00			64,12	64,12		
8	Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset/BMD	100	400	26,93	108	31,87	127	-	-	6,25	25	-	-	25,61	102	10,15	127	31,87	100,00	37,09	235	37,09	58,80	
	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	Terfasilitasinya penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset	100	400	26,93	108	31,87	127	-	-	6,25	25	-	-	25,61	102	31,87	127	100,00	100,00	58,80	235	58,80	58,80	Bappenda
									-		6,25		-		25,61	Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja		100,00	100,00			58,80	58,80		
																			ST	ST					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			88,57	89,18			68,61	57,99	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			T	T			S	R	
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja : 1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD,																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Masih adanya pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan, 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya																									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappenda Provinsi NTB

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappenda Tahun 2017 dengan realisasi yang dicapai yang rata-rata mencapai **92,85%**. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan dan kebijakan yang ditetapkan sudah tepat. Adapun predikat yang diberikan oleh instansi penilai dalam hal ini Inspektorat Provinsi NTB terhadap kinerja Bappenda Tahun 2017 bernilai BB. Hal inilah yang memberikan optimisme bagi segenap jajaran Bappenda Provinsi NTB untuk menjalankan rutinitas program dan kegiatan untuk selalu berpedoman pada tata cara dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, guna terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan bersih (*Clean Governance*). Pada pencapaian sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terealisasi.

Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama, yaitu pada Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pencapaiannya di atas 100%, namun demikian masih terdapat hal-hal yang belum optimal, diantaranya adalah:

1. Pelayanan yang belum optimal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut kondisi gedung dan fasilitasnya, kompetensi SDM dalam memelihara “prinsip-prinsip *customer relationship*” yang makin nyaman;
2. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor non pajak seperti maksimalisasi pemanfaatan asset-asset yang bernilai ekonomi serta potensi pendapatan yang timbul dari inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan info pajak pada kategori premium, dan kerjasama pengelolaan bersama asset di lingkungan Bappenda untuk kepentingan sektor swasta dan fasilitas penunjang aktivitas non kedinasan pegawai.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat pengguna. Adapun peningkatan pelayanan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Peningkatan standarisasi fasilitas sarana dan prasarana pada UPTB-UPPD Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di kota/kabupaten;

2. Peningkatan fasilitas pelayanan khusus melalui pelayanan *drive thru*, pelayanan gerai samsat/samsat outlet, samsat keliling, Samsat Kartini/Ladies, dan Samsat Bahari yang berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna;
3. Pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi;
4. Perintisan *banking system* dalam penerimaan pendapatan daerah di sektor pajak;
5. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e-Samsat); dan
6. Mendorong kesadaran taat bayar pajak khususnya ASN Bappenda pada tahap awal, dan selanjutnya OPD Pemprov NTB, serta masyarakat yang berdomosili di wilayah NTB melalui fasilitas AutoDebet tebungan Bank NTB (t – Samsat);

Berikut diuraikan tentang Realisasi Capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Tahun Anggaran 2017. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Baratg Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sampai dengan Tahun Anggaran 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	Target Renstra Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pd Tahun ke-			
	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Pertumbuhan PAD	13,78	13,64	2,09	5,19	29,60	24,86	-0,93	23,87	114,84	82,29	93,78	102,61

Sumber : Bappenda Provinsi NTB (data diolah)

Sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, target renstra menunjukkan angka penurunan yang signifikan terutama dari tahun 2015 - 2016 sebesar -11,55%, sementara target dari tahun 2014 - 2015 turun sebesar -0,14%, sedangkan target tahun 2016 - 2017 meningkat sebesar 3,1%. Penurunan target pada tahun 2016 tersebut disebabkan karena tidak tercapainya realisasi pertumbuhan

PAD sehingga menyebabkan direvisinya RPJMD 2013-2018 terkait dengan penetapan indikator kinerja daerah yang dirubah pada akhir tahun 2016 sementara realisasi capaian tahun 2017 sebesar 23,87%.

Persentase rasio capaian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terjadi penurunan pada tahun 2015 akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan pada tahun 2017 rasio capaian pada tahun 2017 sebesar 102,61%.

Tabel 2.4

Perbandingan Realisasi Pendapatan dengan Target Pendapatan
Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 (dalam juta rupiah)

No.	Kelompok Dan Jenis Pendapatan	2014			2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Total Pendapatan	2.923.616	2.789.427	95,41	3.555.509	3.448.114	96,98	3.802.933	3.853.806	101,34	5.121.402	5.083.156	99,25
I	Pendapatan Asli Daerah	1.194.262	1.115.060	93,37	1.420.471	1.372.109	96,6	1.450.045	1.356.928	93,58	1.641.689	1.684.469	102,61
a.	Pajak Daerah	963.903	904.784	93,87	1.008.440	1.010.655	100,22	1.037.550	1.003.261	96,7	1.144.453	1.180.802	103,18
	Pajak Kendaraan Bermotor	214.350	218.001	101,7	230.838	240.153	104,04	248.153	269.188	108,48	311.894	324.423	104,02
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	336.836	339.627	100,83	335.050	318.503	95,06	318.503	322.209	101,16	299.818	313.247	104,48
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	212.278	209.841	98,85	214.278	227.320	106,09	192.900	188.946	97,95	192.900	198.672	102,99
	Pajak Air Permukaan	350	271	77,54	275	298	108,19	300	361	120,43	1.000	1.003	100,27
	Pajak Rokok	200.090	137.043	68,49	228.000	224.381	98,41	277.693	222.557	80,14	338.842	343.457	101,36
b.	Retribusi Daerah	13.856	19.839	143,17	22.902	24.357	106,35	29.891	29.516	98,75	24.685	23.086	93,52
	Retribusi Jasa Umum	4.469	10.851	242,81	13.446	14.153	105,26	19.059	19.214	100,81	7.519	9.938	132,17
	Retribusi Jasa Usaha	8.650	7.886	91,17	8.563	8.410	98,22	9.183	8.541	93,01	15.322	11.284	73,64
	Retribusi Perijinan Tertentu	738	1.101	149,24	894	1.794	200,68	1.649	1.761	106,81	1.844	1.864	101,08
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	93.287	55.670	59,68	123.838	63.229	51,06	157.965	72.828	46,1	166.202	163.852	98,59
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	123.215	134.768	109,38	265.291	273.867	103,23	224.640	251.324	111,88	306.347	316.728	103,39
II	Dana Perimbangan	1.226.208	1.212.086	98,85	1.491.850	1.450.695	97,24	2.333.604	2.489.758	106,69	3.342.730	3.268.927	97,79
a.	Dana Bagi Hasil Pjk/Bukan Pjk	191.155	177.033	92,61	188.959	147.804	78,22	247.954	374.903	151,2	367.529	346.522	94,28
b.	Dana Alokasi Umum	980.390	980.390	100	1.088.634	1.088.634	100	955.793	1.024.551	107,19	1.537.778	1.537.778	100,00
c.	Dana Alokasi Khusus	54.663	54.663	100	214.257	214.257	100	1.129.857	1.090.304	96,5	1.437.423	1.384.627	96,33
III	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	503.146	462.280	91,88	643.188	625.310	97,22	19.285	7.120	36,92	136.983	129.760	94,73

Sumber : Bappenda Provinsi NTB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappenda

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari hal-hal utama yang terkait dengan fungsi pelayanan Bappenda Provinsi NTB. Selain itu, koordinasi dan sinergi program antar OPD penghasil di Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan menjadi hal yang perlu dikaji sehingga permasalahan dan hambatan dapat ditanggulangi sedini mungkin.

Dengan diketahuinya hal-hal tersebut, maka dapat pula diketahui tantangan dan peluang yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna atau wajib pajak/wajib retribusi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

Apabila kita komparasikan dengan OPD Kabupaten/Kota, ada perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota. Perbedaannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing OPD penghasil, sehingga sasaran dari kegiatan yang hendak dicapai berbeda. Selain itu kewenangan dalam memungut pajak pun berbeda, sehingga objek pajaknya pun menjadi berbeda.

Persamaan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dapat dilihat dari indikator kinerja dan sasaran yang hendak dicapai. Persamaan tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur;
4. Menciptakan *networking* dan koordinasi yang sinergi dengan seluruh pihak terkait.

Untuk pemasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat ;

2. Ketiadaan prototype standar sarana prasarana kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan;
3. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal *drafter* belum memadai ;
4. Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan ;
5. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk aparaturBappenda ;
6. Model *Smart Planning* belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan dokumen LKjIP ;
7. Metode penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPI) perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan ;
8. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan ;
9. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam format dan metodenya ;
10. Belum tersedianya instrumen persepsi *mal* adminitrasi/KKN.

Dari hal-hal tersebut, maka rekomendasi dan dan catatan strategis yang dapat diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Aparatur pengelola pendapatan yang makin bersaing dengan kelembagaan keuangan baik sektor pemerintahan lainnya maupun dengan sektor swasta ;
2. Melanjutkan standarisasi penyediaan sarana penunjang pelayanan yang makin proporsional dengan beban layanannya ;
3. Mempertajam kalkulasi dan pemilihan asumsi-asumsi yang memperkuat kuantitas dan kualitas target pendapatan daerah ;
4. Melanjutkan upaya-upaya penguatan peran dan fungsi selaku unit pengelola dan koordinator pendapatan daerah yang makin akuntabel;
5. Terus mengupayakan otomatisasi pelayanan pendapatan yang makin memiliki keterkaitan dengan sistem perbankan yang menjadi mitra kas daerah;
6. Terus mengupayakan penajaman kalkulasi untuk memperkuat kualitas penetapan kebutuhan belanja ;
7. Terus berupaya untuk meningkatkan ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja.

Arah Kebijakan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi jumlah obyek pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU);
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB);
3. Memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih menggunakan nomor kendaraan luar wilayah Nusa Tenggara Barat yang berdomisili di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk melakukan mutasi kendaraannya;
4. Melakukan Optimalisasi usaha Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
6. Mengoptimalkan Pengelolaan serta Peran Aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemberian kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan adanya prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berdasarkan kondisi, fenomena, isu strategis yang terjadi di NTB, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan program prioritas Gubernur NTB dan kegiatan tematik untuk mensinergikan pembangunan yang bermutu dan akuntabel.

Apabila kita bandingkan dengan rancangan awal RKPD tahun 2019, maka program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat utamanya untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas Gubernur Nusa Tenggara Barat, dimana Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelaksanaan misi **ketiga** yaitu melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan serta misi **keempat** yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah. Untuk dapat mendukung pencapaian visi Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut, maka diperlukan sinkronisasi agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan agenda prioritas yang direncanakan oleh

Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hal-hal yang digariskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2019, penyusunan program/pembangunan diarahkan kepada program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan sasaran programnya yaitu terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi.

Selain itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat didalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam masa transisi pemerintahan lama dan pemerintahan baru, memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya kemitraan dengan perbankan dan pihak lainnya yang berpotensi dalam berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan serta penguatan pelayanan Bappenda, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019.

Adanya gabungan antara kebutuhan anggaran belanja dengan kemampuan pendapatan yang diperoleh mengakibatkan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran belanja. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan umum perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2018 lebih ditekankan peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Tabel 2.5.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	se-NTB	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	18.279.303	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Daerah	Mataram	Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional berupa barang dan jasa, serta perjalanan dinas	100 %	18.279.303
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi NTB	Jumlah masa pembiayaan jasa surat menyurat	12 Bulan	129.980	Penyediaan jasa surat menyurat	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan jasa Surat Menyurat	12 Bulan	129.980
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3.002.159	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3.002.159

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi NTB	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	83 Orang	886.119	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	83 Orang	886.119
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi NTB	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	115 Orang	2.564.875	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	115 Orang	2.564.875
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi NTB	Jumlah jenis alat tulis kantor	620 Jenis	1.137.362	Penyediaan alat tulis kantor	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan alat tulis kantor	620 Jenis	1.137.362
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi NTB	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	145 Jenis/Pkt	1.730.699	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan penyediaan barang cetakan	145 Jenis/Pkt	1.730.699
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi NTB	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	129.794	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan jasa pelayanan penerangan kantor	12 Bulan	129.794
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi NTB	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	267 Unit/Pkt	5.482.957	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan perlengkapan kantor	267 Unit/Pkt	5.482.957
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi NTB	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	147 Exp/Bulan	99.008	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan bahan bacaan media masa	147 Exp/Bulan	99.008
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi NTB	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	551.870	Penyediaan makanan dan minuman	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum rapat	12 Bulan	551.870
1.11	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah unit jasa kebutuhan koordinasi antar lembaga	12 Bulan	505.240	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Mataram	Terfasilitasinya koordinasi penyelarasan antara Pemda, Pem.Pusat dan Provi. Lainnya	12 Bulan	505.240
1.12	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Provinsi NTB	Jumlah Jasa tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	13 Orang	457.900	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	13 Orang	457.900
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor	54 Orang	1.601.340	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Mataram	Terfasilitasinya kebutuhan keamanan kantor	54 Orang	1.601.340
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi NTB	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100 %	22.598.298	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi NTB	Prosentase Terfasilitasinya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	100 %	22.598.298
2.1	Pembangunan gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah gedung kantor yang dibangun	23 Paket	9.665.510	Pembangunan gedung kantor	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pembangunan gedung kantor	23 Paket	9.665.510
2.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	43 Unit/Pkt	4.232.140	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	43 Unit/Pkt	4.232.140
2.3	Pengadaan mebeleur	Provinsi NTB	Jumlah paket mebeleur	53 Buah/Pkt	1.511.640	Pengadaan mebeleur	Provinsi NTB	Terfasilitasinya kebutuhan meubelair	53 Buah/Pkt	1.511.640
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	12 Bulan	1.088.561	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	1.088.561
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	170 Unit	2.255.273	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan operasional	170 Unit	2.255.273

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	345.437	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	345.437
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Provinsi NTB	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	12 Bulan	346.937	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	346.937
2.8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	12 Bulan	3.152.801	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Provinsi NTB	Terfasilitasinya rehabilitasi bangunan gedung kantor	12 Bulan	3.152.801
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	588.987	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB	Persentase dukungan peningkatan Kualitas dan kapasitas SD Aparatur	100 %	588.987
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi NTB	Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	1 Tahun	211.150	Pendidikan dan pelatihan formal	provinsi NTB	Terfasilitasinya Aparatur peserta pendidikan formal, diklat teknis substantive, diklat teknis struktural dan fungsional	1 Tahun	211.150
3.2	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Provinsi NTB	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	12 Bulan	377.837	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pembinaan mental, fisik & disiplin aparatur	12 Bulan	377.837
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi NTB	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	10 Dokumen	1.425.776	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi NTB	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data	10 Dokumen	1.425.776
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi NTB	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT & PK) yang disusun	2 Dokumen	315.950	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT & PK) yang disusun	2 Dokumen	315.950
4.2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Mataram	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	285.736	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Mataram	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	285.736
4.3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Mataram	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra 18-23 draft awal; Renja OPD; RKA, DPA; DPPA; dan Evaluasi Kinerja yang disusun	5 Dokumen	586.260	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Mataram	Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Perencanaan yang disusun (Rencana Kerja/RKA/DPA TA 2018 dan 2019)	5 Dokumen	586.260
4.4	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Mataram	Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kinerjanya; dan Laporan Tahunan OPD	2 Dokumen	237.830	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Mataram	Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Profil Kinerja dan Data Informasi OPD	2 Dokumen	237.830
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi NTB	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD	1 Dokumen	472.055	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi NTB	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD	1 Dokumen	472.055
5.1	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Provinsi NTB	Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah	1 Dokumen	472.055	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyusunan Laporan pengelolaan asset/ barang milik daerah	1 Dokumen	472.055

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi NTB	Persentase Kapasitas PAD	12,5 %	26.530.242	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi NTB	Mendukung terwujudnya Peningkatan Kapasitas PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	12,5 %	26.530.242
6.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Mataram	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun	4 Perda/ Pergub	787.482	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Mataram	Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah	4 Perda/ Pergub	787.482
6.2	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Provinsi NTB	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	13 Laporan	9.538.464	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Provinsi NTB	Tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah	13 Laporan	9.538.464
6.3	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Provinsi NTB	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	53 Sentra	1.490.963	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Provinsi NTB	Terfasilitasinya peningkatan keterampilan teknis ke Samsatan	53 Sentra	1.490.963
6.4	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	1512 Hari	5.074.268	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	1512 Hari	5.074.268
6.5	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23 Event	2.730.468	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	Terfasilitasinya peningkatan sadar pajak dan retribusi daerah	23 Event	2.730.468
6.6	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah	2 Kasus	75.120	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa Pajak Daerah dan Retribusi daerah	2 Kasus	75.120
6.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	4 Paket	860.506	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Provinsi NTB	Terfasilitasinya kenyamanan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB	4 Paket	860.506
6.8	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Provinsi NTB	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	13 Laporan	1.971.756	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Provinsi NTB	Terfasilitasinya update data wajib pajak terlaksananya penyampaian surat teguran dan penangihan tunggakan kepada wajib pajak	13 Laporan	1.971.756
6.9	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait	2 Laporan	620.040	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya kebutuhan konsultasi koordinasi dan monitoring dana perimbangan	2 Laporan	620.040
6.10	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait	12 Bulan	257.850	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya penyusunan bahan laporan rapat koordinasi dipenda NTB dengan dinas instansi terkait	12 Bulan	257.850
6.11	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan sinkronisasi data, penerimaan retribusi dan pll dengan pihak terkait	2 Laporan	249.558	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya penyusunan data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan PLL	2 Laporan	249.558
6.12	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi PPL	2 Laporan	345.450	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya penyusunan data Obyek retribusi dan PLL	2 Laporan	345.450

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
6.13	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan evaluasi obyek retribusi dan pll dan pelaksanaan bintek	3 Laporan	1.583.399	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan bintek	3 Laporan	1.583.399
6.14	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya	3 Laporan	75.120	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL	3 Laporan	75.120
6.15	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah dokumen data PBBKB	1 Laporan	228.450	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya penyusunan data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Laporan	228.450
6.16	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah dokumen data potensi penerimaan Pajak Air Permukaan	1 Dokumen	179.850	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya upaya peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan	1 Dokumen	179.850
6.17	Akurasi Data Pajak Rokok	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah dokumen data pajak rokok	1 Dokumen	461.500	Akurasi Data Pajak Rokok	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Terfasilitasinya upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok	1 Dokumen	461.500
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Provinsi NTB	Persentase Sentra Layanan yang memperoleh penilaian IKM	100 %	907.912	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaks. Kebijakan KDH	Provinsi NTB	Persentase peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada seluruh sentra layanan	100 %	907.912
7.1	Pengawasan Internal secara berkala	se-NTB	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aspek kelembagaan	1 Laporan	149.142	Pengawasan Internal secara berkala	se-NTB	Terfasilitasinya penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian intern	1 Laporan	149.142
7.2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	se-NTB	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	1 Laporan	50.740	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	se-NTB	Terfasilitasinya penyusunan laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan	1 Laporan	50.740
7.3	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	se-NTB	jumlah laporan hasil movev pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	12 Laporan	489.880	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	se-NTB	Terfasilitasinya penyusunan laporan Movev Pelaksanaan Opgab	12 Laporan	489.880
7.4	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	se-NTB	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan	2 Paket	218.150	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	se-NTB	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas aparat pengendalian dan pembinaan	2 Paket	218.150
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Provinsi NTB	Tingkat gangguan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras teknologi informasi pendapatan	100 %	1.641.148	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Provinsi NTB	Persentase peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan inovasi layanan pendapatan daerah	100 %	1.641.148
8.1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Mataram	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem	15 Paket	572.820	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Mataram	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem	15 Paket	572.820

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
			informasi Pendapatan daerah yang tersusun					informasi Pendapatan daerah yang tersusun		
8.2	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	se-NTB	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan	43 Simpul	435.540	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	se-NTB	Terfasilitasinya pengembangan perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah	43 Simpul	435.540
8.3	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	se-NTB	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	4 Paket	632.788	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	se-NTB	Terfasilitasinya peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	4 Paket	632.788
9	Program Reformasi Birokrasi	Provinsi NTB	Persentase Sentra Layanan yang memperoleh Sertifikasi ISO	100 %	854.225	Program Reformasi Birokrasi	Provinsi NTB	Pembinaan dan Pengawasan kelembagaan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	854.225
9.1	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Provinsi NTB	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur	11 Unit	595.375	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Provinsi NTB	Fasilitasi pembinaan, Pengendalian dan pengawasan kinerja personal dan kelembagaan	11 Unit	595.375
9.2	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Kota Mataram	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip	4 Dokumen	258.850	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Kota Mataram	Terfasilitasinya penyusunan Laporan pengelolaan dan Penataan Arsip	4 Dokumen	258.850

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 diambil dari proses *bottom up planning* dan *top down planning* dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dan rancangan awal Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 – 2023. Pada proses *bottom up planning*, lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh UPTB-UPPD/Samsat dan mitra kerjanya diseluruh Kab/Kota se-NTB yang berjumlah 10 (sepuluh) unit yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan beserta jajaran Bappenda Provinsi NTB.

Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan makin berbasis teknologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan

dalam menerima pelayanan. Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi. Disamping itu di Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berencana akan merehabilitasi dan membangun kembali gedung pelayanan UPTB di empat wilayah yang terdampak langsung sebagai akibat terjadinya gempabumi tektonik 7 SR yang melanda Pulau Lombok pada 29 Juli hingga 19 Agustus 2018, yang meluluh lantahkan bangunan baik gedung kantor, sarana pendidikan, sarana peribadatan, fasilitas umum dan rumah-rumah warga terutama di Kab. Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selain itu akan dibentuk pula beberapa Samsat Pasar, yang telah digagas di ibukota kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur dan untuk selanjutnya akan dikembangkan di kabupaten/kota lainnya, sehingga secara kuantitas akan terjadi penambahan sentra pelayanan kesamsatan di seluruh wilayah kerja Bappenda Provinsi NTB.

Tabel 2.6.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2019
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Se Prov. NTB	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	
01.01	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bappenda Provinsi NTB	Provinsi NTB	Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional seperti listrik, air, telepon, internet, ATK, perangko, materai, penggantian, cetakan makan dan minum, serta perjalanan dinas	100	
01.02	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Mataram	Kota Mataram	Sda	100	
01.03	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Gerung	Kab. Lombok Barat	Sda	100	
01.04	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Praya	Kab. Lombok Tengah	Sda	100	
01.05	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Tanjung	Kab. Lombok Utara	Sda	100	
01.06	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Selong	Kab. Lombok Timur	Sda	100	
01.07	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Sda	100	
01.08	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Sumbawa Besar	Kab. Sumbawa	Sda	100	
01.09	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Dompus	Kab. Dompus	Sda	100	
01.10	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Raba	Kota Bima	Sda	100	
01.11	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Panda	Kab. Bima	Sda	100	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Se Prov. NTB	Persentase Ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	
02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	100	

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
02.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTB UPPD Kab/Kota se Provinsi NTB	se Provinsi NTB	Sda	100	
02.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Sda	100	
02.04	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor pada UPTB UPPD Kab/Kota se Provinsi NTB	Tanjung; Selong; Taliwang dan Sumbawa	Tingkat pemenuhan Pembangunan Gedung Kantor dan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana akibat bencana gempabumi	100	
02.05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor	100	
02.06	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan operasional	100	
02.07	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100	
02.08	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan peralatan kantor	100	
02.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan untuk wajib pajak	100	
02.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTB - UPPD Kab/Kota se Provinsi NTB	se Provinsi NTB	Sda	100	
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Se Prov. NTB	Persentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	
05.01	Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat se NTB (Aplikasi Samsat, Penetapan Pajak Daerah, Bendahara Penerima, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Barang Daerah)	Kota Mataram	1) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal 2) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif 3) Proporsi aparatur yg memiliki sertifikat kompetensi profesi	100	
05.02	Pembinaan mental dan fisik Aparatur Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase terpenuhinya Narasumber/Instruktur Olah Raga, Penceramah Agama, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, Kursus singkat, pelatihan/seminar/Kursus, Rakor, Raker dan Pakaian Dinas	100	
05.03	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Mataram	Kota Mataram	Sda	100	
05.04	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Gerung	Kab. Lombok Barat	Sda	100	
05.05	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Praya	Kab. Lombok Tengah	Sda	100	
05.06	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Tanjung	Kab. Lombok Utara	Sda	100	
05.07	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Selong	Kab. Lombok Timur	Sda	100	
05.08	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Sda	100	
05.09	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Sumbawa Besar	Kab. Sumbawa	Sda	100	
05.10	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Dompu	Kab. Dompu	Sda	100	
05.11	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Raba	Kota Bima	Sda	100	
05.12	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Panda	Kab. Bima	Sda	100	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	se Prov. NTB	Persentase penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	100	
06.01	Penyusunan Rencana Kerja, Forum OPD, RKA, DPA Tahun 2020 dan DPPA tahun 2019 Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase Rencana Kerja, Forum OPD, RKA, DPA Tahun 2020 dan DPPA tahun 2019	100	
06.02	Evaluasi dan Pelaporan Internal Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase laporan bulanan, laporan kinerja program, evaluasi kinerja, Lakip/LKjIP, RKT, PK, LKPJ dan LPPD	100	
06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase Laporan keuangan Bappenda Provinsi NTB	100	

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
06.04	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD	Kota Mataram	Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Profil Kinerja dan Data Informasi OPD	100	
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	se Prov. NTB	Persentase Peningkatan Kapasitas PAD	12,5	
17.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Kota Mataram	Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah	4 Perda/ Pergub	
17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Kab/Kota se-NTB	Tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah	13 Laporan	
17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Kab/Kota se-NTB	Terfasilitasinya peningkatan keterampilan teknis ke Samsatan	53 Sentra	
17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Kab/Kota se-NTB	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	1512 Hari	
17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab/Kota se-NTB	Terfasilitasinya peningkatan sadar pajak dan retribusi daerah	23 Event	
17.34	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Mataram	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa Pajak Daerah dan Retribusi daerah	2 Kasus	
17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Provinsi NTB	Terfasilitasinya kenyamanan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB	4 Paket	
17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Provinsi NTB	Terfasilitasinya update data wajib pajak terlaksananya penyampaian surat teguran dan penangihan tunggakan kepada wajib pajak	13 Laporan	
17.40	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Provinsi NTB dan Prov. Lainnya	Terfasilitasinya kebutuhan konsultasi koordinasi dan monitoring dana perimbangan	2 Laporan	
17.43	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Provinsi NTB dan Prov. Lainnya	Terfasilitasinya penyusunan bahan laporan rapat koordinasi dipenda NTB dengan dinas instansi terkait	12 Bulan	
17.52	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB dan Prov. Lainnya	Terfasilitasinya penyusunan data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan PLL	2 Laporan	
17.55	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyusunan data Obyek retribusi dan PLL	2 Laporan	
17.56	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan bimtek	3 Laporan	
17.58	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL	Provinsi NTB	Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL	3 Laporan	
17.73	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB dan Prov. Lainnya	Terfasilitasinya penyusunan data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Laporan	
17.74	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB dan Prov. Lainnya	Terfasilitasinya upaya peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan	1 Dokumen	
17.75	Akurasi Data Pajak Rokok	Provinsi NTB dan Prov. Lainnya	Terfasilitasinya upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok	1 Dokumen	
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Se Prov. NTB	Persentase Sentra Layanan yang memperoleh penilaian IKM	100	
20.01	Penelusuran/sensus Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) di semua UPTB UPPD se Provinsi NTB	Provinsi NTB	Jumlah laporan hasil movev pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor yang berkategori TMDU, Aktif DU dan Kendaraan Luar Daerah.	100	

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
20.02	Pengawasan Internal secara berkala	se-NTB	Sda	100	
20.03	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	se-NTB	Sda	100	
20.04	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	se-NTB	Sda	100	
20.05	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	se-NTB	Teridentifikasinya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang	100	
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Se Prov. NTB	Persentase pemanfaatan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras teknologi informasi pendapatan	100	
23.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Mataram	Tingkat gangguan jaringan dan sistem dan tingkat jangkauan didtribusi layanan	43 Simpul	
23.02	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	se-NTB	Tingkat kebutuhan peningkatan informasi layanan	15 Paket	
23.03	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	se-NTB	Terfasilitasinya peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	4 Paket	
82	Program Reformasi Birokrasi	Se Prov. NTB	Persentase Sentra Layanan yang memperoleh Sertifikasi ISO	100	
82.01	Sertifikasi ISO 9001-2008 pada UPTB UPPD Gerung - Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Barat	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	
82.02	Sertifikasi ISO 9001-2008 pada UPTB UPPD Selong - Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	Sda	100	
82.03	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Provinsi NTB	Sda	100	
82.04	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Kota Mataram	Sda	100	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Bappenda.

Telaahan terhadap kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda. Prioritas pembangunan Tahun 2019 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang implementasinya dilakukan oleh UPTBUPPD, maka Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat memprioritaskan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dengan mempermudah pola pelayanan kepada masyarakat yang berbasis IT serta beberapa pembangunan/sarana dan prasarana pendukung yang secara bertahap sesuai dengan kemampuan dana pada tahun mendatang untuk semua UPTB PPD/Samsat se-NTB.

Pada Tahun Anggaran berjalan 2019, Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat baru akan melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kantor, berupa:

- a. Rehab gedung kantor induk Bappenda serta UPTB Se Wilayah NTB;
- b. Pembangunan sarana pendukung kesamsatan berupa pembukaan samsat outlet di masbagik dan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, serta pembukaan pelayanan samsat PELITA (perpanjangan lima tahun) dengan jam pelayanan dari pukul 15.00 sampai dengan 20.30 wita.
- c. Pembangunan sarana pendukung gedung kantor Samsat pada UPTB Panda-Bima
- d. Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTBUPPD se-NTB.
- e. Serta penambahan beberapa unit mobil operasional dan beberapa unit kendaraan roda 2 di kantor induk serta pada masing-masing UPTB UPPD se NTB.

Pelaksanaan pembangunan ini diharapkan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah dengan terus berupaya memberikan berbagai kemudahan terhadap masyarakat, dalam mengakses layanan publik yang layak. Capaian ini tentu akan mendorong terlaksananya program-program Bappenda khususnya untuk mendukung beberapa tujuan, sasaran dan program kerja Bappenda. Semua upaya ini tentunya bermuara pada satu tujuan yakni terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappenda

Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 telah mengacu kepada Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 – 2023, yang disesuaikan dengan perkiraan-perkiraan kondisi dan asumsi potensi pendapatan di Tahun 2018 serta arahan pembangunan daerah yang ada pada rancangan awal RPJMD 2018 – 2023.

Untuk itu, tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal ;
2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah ;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya ;
4. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima; dan
5. Memantapkan kinerja organisasi.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai adalah:

1. Tercapainya penerimaan pendapatan daerah ;
2. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah ;
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah ;
4. Meningkatnya kualitas SDM ;
5. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah ;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah ;
7. Meningkatkan modernisasi informasi layanan pendapatan daerah ;
8. Meningkatkan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah ; dan
9. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

A. Rumusan program dan kegiatan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Bappenda Provinsi NTB yaitu:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
5. Pengembangan daerah terisolir.

B. Rekapitulasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pada awalnya Tahun anggaran 2019 Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak 9 (sembilan) Program dengan 54 (lima puluh empat) kegiatan, namun sesuai perkembangan rancangan awal sampai penyusunan Renja Bappenda Provinsi NTB diubah menjadi 6 (enam) program dan 54 Kegiatan, dengan pagu indikatifnya dan prakiraan maju rencana tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bappenda Induk dan UPTB UPPD se-NTB					58.389.182.700				63.882.646.240
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	se-NTB	100	%	15.375.444.123	PAD		100	16.712.422.493
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah SURAT	Provinsi NTB	17.500	Surat	124.320.000	PAD	Lanjutan	17.500	135.130.299
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	JENIS Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	3	Jenis	2.891.583.840	PAD	Lanjutan	3	3.143.022.759
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Provinsi NTB	83	Orang	1.006.867.000	PAD	Lanjutan	83	1.094.419.554
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Provinsi NTB	115	Orang	2.416.707.000	PAD	Lanjutan	115	2.626.852.799
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Provinsi NTB	620	Jenis	1.088.973.565	PAD	Lanjutan	667	1.183.665.731
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	Provinsi NTB	145	Jenis/Pkt	1.787.680.500	PAD	Lanjutan	156	1.943.129.028

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Provinsi NTB	12	Jenis	136.984.300	PAD	Lanjutan	12	148.895.829
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi NTB	267	Unit/Pkt	2.486.236.000	PAD	Lanjutan	287	2.702.427.723
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	Provinsi NTB	147	Media/ Exp	98.982.600	PAD	Lanjutan	158	107.589.675
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang yang dijamu makanan dan minuman	Provinsi NTB	144	kali	510.270.000	PAD	Lanjutan	144	554.640.748
01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Orang penyelaras program pusat dan daerah	Provinsi NTB	63	kali	552.328.238	PAD	Lanjutan	70	600.356.178
01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	Provinsi NTB	17	Orang	800.410.560	PAD	Lanjutan	17	870.010.605
01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	Provinsi NTB	54	Orang	1.474.100.520	PAD	Lanjutan	54	1.602.281.566
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	Provinsi NTB	100	%	13.013.573.050			100	13.540.967.857
02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Provinsi NTB	23	Unit	4.567.327.800	PAD	Lanjutan	25	3.825.281.007
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	43	Unit	1.496.740.000	PAD	Lanjutan	46	1.578.216.606
02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket mebeleur	Provinsi NTB	53	Buah/Pkt	927.990.000	PAD	Lanjutan	57	978.506.105
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	Provinsi NTB	12	Paket	885.100.800	PAD	Lanjutan	12	933.282.187
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/opresional	Provinsi NTB	170	Unit	2.029.755.000	PAD	Lanjutan	174	2.140.246.900
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Provinsi NTB	12	Unit	313.436.800	PAD	Lanjutan	12	330.499.060
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Provinsi NTB	12	Unit	340.087.100	PAD	Lanjutan	12	358.600.080
02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Provinsi NTB	12	Paket	2.453.135.550	PAD	Lanjutan	12	3.396.335.912
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	Provinsi NTB	100	%	895.703.800			100	944.462.372
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	Provinsi NTB	45	Orang	270.228.000	PAD	Lanjutan	45	284.938.143
05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Provinsi NTB	48	Kali	224.925.800	PAD	Lanjutan	48	237.169.871
05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur	Provinsi NTB	11	Unit	230.900.000	PAD	Baru	11	243.469.283

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.24	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan	Provinsi NTB	2	Paket	169.650.000	PAD	Baru	2	178.885.075
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	Provinsi NTB	93	Dokumen	1.036.860.454			92	1.093.303.036
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKJIP, LKPJ, LPPD, Lap.Tahunan, Laporan Evaluasi Kinerja) yang disusun	Provinsi NTB	43	Dokumen	242.219.867	PAD	Lanjutan	43	255.405.359
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun	Mataram	1	Dokumen	225.725.600	PAD	Lanjutan	1	238.013.209
06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra 18-23 draft awal; Renja OPD; RKA, DPA; DPPA; Rahrir Renstra OPD, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja dan Pakta Integritas Individu/IKI. yang disusun	Mataram	47	Dokumen	409.184.987	PAD	Lanjutan	46	431.459.399
06.17	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kinerjanya	Mataram	2	Dokumen	159.730.000	PAD	Baru	2	168.425.069
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	Provinsi NTB	85	%	736.425.000			85	772.513.065
07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah	Provinsi NTB	11	Dokumen	477.585.000	PAD	Lanjutan	11	503.582.838
07.18	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	Provinsi NTB	1	Dokumen	165.500.000	PAD	Baru	1	174.509.166
07.20	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip	Mataram	4	Dokumen	93.340.000	PAD	Baru	4	94.421.061
28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	Provinsi NTB	47,19	%	27.331.176.273		Baru	49,33	30.818.977.417
28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Provinsi NTB	12	Dokumen	8.437.101.640	PAD	Baru	12	9.513.781.709
28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi NTB	63	Sentra	2.986.996.500	PAD	Baru	68	3.368.174.745
28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Provinsi NTB	4	Dokumen	1.006.374.200	PAD	Baru	4	1.134.800.180
28.04	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen data PBBKB	Provinsi NTB	1	Dokumen	502.700.000	PAD	Baru	1	566.850.830

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
28.05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah dokumen data potensi penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB	1	Dokumen	283.475.000	PAD	Baru	1	319.649.968
28.06	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Jumlah dokumen data pajak rokok	Provinsi NTB	1	Dokumen	575.605.000	PAD	Baru	1	649.059.423
28.07	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait	Provinsi NTB	2	Dokumen	1.083.950.000	PAD	Baru	2	1.222.275.625
28.08	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah laporan sinkronisasi data, penerimaan retribusi dan pll dengan pihak terkait	Provinsi NTB	2	Dokumen	222.939.000	PAD	Baru	2	251.388.815
28.09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Jumlah laporan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PPL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	2	Dokumen	701.175.013	PAD	Baru	2	790.653.746
28.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Jumlah laporan evaluasi obyek retribusi dan pll dan pelaksanaan bintek	Provinsi NTB, Prov.lainnya	3	Dokumen	1.050.910.000	PAD	Baru	3	1.185.019.307
28.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	3	Dokumen	67.290.000	PAD	Baru	3	75.877.049
28.12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	7	Regulasi	580.206.500	PAD	Baru	4	654.248.132
28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah frekuensi pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Provinsi NTB, Prov.lainnya	1.396	Kali	3.960.460.000	PAD	Baru	1.396	4.465.864.406
28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	23	Event	1.820.878.300	PAD	Baru	23	2.053.245.226
28.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	2	Kasus	294.787.500	PAD	Baru	2	332.406.085
28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Provinsi NTB, Prov.lainnya	13	Laporan	1.523.413.500	PAD	Baru	13	1.717.820.184
28.17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan dan pengendalian aspek kelembagaan	Provinsi NTB, Prov.lainnya	1	Laporan	176.826.620	PAD	Baru	1	199.391.916
28.18	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	jumlah laporan hasil movev pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Provinsi NTB	12	Laporan	375.110.000	PAD	Baru	12	422.978.744
28.19	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait	Provinsi NTB	12	Laporan	255.595.000	PAD	Baru	12	288.212.130

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
28.20	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun	Provinsi NTB	10	Paket	386.830.000	PAD	Baru	15	436.194.363
28.21	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan	Provinsi NTB	63	Simpul	435.190.000	PAD	Baru	68	490.725.706
28.22	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	Provinsi NTB	4	Paket	603.362.500	PAD	Baru	4	680.359.128

Berbagai aktifitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan sebagai penerapan rencana aksi untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang direncanakan oleh Bappenda Provinsi NTB dengan seluruh jajarannya serta mitra kerjanya.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi organisasi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategisnya. Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD.

Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu; anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen beserta para pihak yang melaksanakan Program dan Kegiatan, serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Bappenda Provinsi NTB tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS; penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.